

TABEL RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 2019-2023

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas	Indikator	Target		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
I	Program: Manajemen Perubahan Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik		Indeks PMPRB Online (Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB) Pemprov Bali	83	84	85
1	Tim Reformasi Birokrasi	- Membentuk Tim RB - Tim RB melaksanakan tugas sesuai dengan rencana aksi - Tim RB melaksanakan monev dan ditindaklanjuti	Persentase Monev RB Pemprov. Bali yang ditindaklanjuti	70%	72%	75%
2	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	- Merencanakan dan mengorganisasikan PMPRB dengan baik - Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja - melakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB - Melaksanakan PMPRB sesuai dengan ketentuan yang	Indeks PMPRB Pemprov Bali (nilai proses)	32	33	34
			Rata-rata indeks PMPRB PD (nilai proses)	15	16	17
3	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	- Memastikan keterlibatan pimpinan secara aktif dan berkelanjutan dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja serta RB - Membuat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan - Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model	Persentase PD yang pimpinannya aktif menerapkan budaya kerja	75%	75%	80%
			Persentase PD yang memiliki agen perubahan yang aktif menyebarkan pesan RB	50%	55%	60%
			website dan medsos yang mutakhir	1 web	1 web	1 web facebook
II	Program: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
1	Harmonisasi peraturan perundang-undangan	- Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron - merevisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	Persentase harmonisasi produk hukum (ranperda/ranpergub) yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	95%
2	Penerapan Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	- Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem	Persentase ranperda/ranpergub yang telah menjadi perda/pergub	80%	80%	85%

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas	Indikator	Target		
III	Program: PENATAAN DAN Penguatan ORGANISASI					
1	Evaluasi Kelembagaan	- Melaksanakan evaluasi kelembagaan - Menganalisa tingkat kematangan OPD	Skor Evaluasi Kelembagaan Pemprov. Bali (Permenpan 20/2018)	72	74	76
			Tingkat Kematangan Pemprov. Bali (Permendagri 99/2018)	38	39	40
2	Penataan Kelembagaan	Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mengajukan perubahan organisasi	Persentase usulan kelembagaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
IV	PROGRAM: PENATAAN TATALAKSANA					
1	Penerapan Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	- Menyusun peta proses bisnis sesuai ketentuan - Menyusun SOP yang merupakan penjabaran peta proses bisnis - Menerapkan SOP - Mengevaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP	Jumlah peta proses bisnis Pemprov. Bali yang disusun	1 probis	1 probis	
			Persentase PD yang memiliki peta proses bisnis berkualitas	70%	72%	75%
			Persentase PD yang telah menerapkan SOP dengan baik	70%	75%	80%
2	Penerapan E-Government	- Menyusun rencana induk pengembangan e-government Provinsi Bali - Menerapkan e-gov pada lingkungan internal - Menerapkan e-gov untuk pelayanan publik	Indeks SPBE	1.6	1.8	2
			Persentase layanan internal yang diterapkan sesuai Perpres 95 tahun 2018	70%	75%	80%
			Persentase layanan eksternal yang terintegrasi	50%	60%	70%
3	Keterbukaan Informasi Publik	- Menerapkan kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik - Melakukan monev KIP	Indeks KIP	61.71	70	80
			Persentase PD yang mempublikasikan DIP yang terupdate	70%	75%	80%
			Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
			Persentase sengketa informasi yang terselesaikan	100%	100%	100%
4	Kualitas Pengelolaan Arsip	- Melakukan pengawasan kearsipan - Melaksanakan audit internal terhadap PD	Indeks Kearsipan	77.6	79	81
			Persentase PD mendapat hasil audit internal arsip cukup	50%	52%	55%
5	Kualitas Pengadaan Barang Jasa	- Melaksanakan pengadaan secara elektronik - Meningkatkan kualitas organisasi	Persentase pagu paket yang diproses secara elektronik	86%	90%	95%
			Tingkat kematangan UKPBJ	level 3	level 3	level 3
V	Program: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah, yang didukung oleh aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.		Indeks Sistem Merit ASN	level 2	level 3	level 3

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas	Indikator	Target		
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (1)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Analisis jabatan dan analisis beban kerja - Melaksanakan perhitungan kebutuhan pegawai - Menyusun rencana redistribusi pegawai - Menyusun proyeksi kebutuhan 5 tahun - Menghitung formasi jabatan 	Persentase PD yang memiliki pegawai sesuai dengan perhitungan kebutuhan pegawai	75%	77%	80%
2	Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumumkan secara luas penerimaan pegawai - Menyelenggarakan pendaftaran dengan mudah, cepat dan pasti (online) - Menyusun persyaratan penerimaan calon pegawai yang jelas dan tidak diskriminatif - Melaksanakan seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN - Mengumumkan secara terbuka hasil seleksi 	Persentase Kepatuhan terhadap proses penerimaan pegawai yang berkualitas (ada kriteria)	100%	100%	100%
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun standar kompetensi jabatan - Melakukan asesment pegawai - Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi - Menyusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi - Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan 	Gap Kompetensi ASN	30%	27%	25%
4	Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan promosi terbuka - Pelaksanaan promosi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi - Melaksanakan promosi terbuka secara kompetitif dan terbuka - Melaksanakan promosi terbuka yang dilakukan oleh panitia seleksi yang independen - Mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka 	Persentase Kepatuhan terhadap pelaksanaan promosi terbuka yang berkualitas (ada kriteria)	100%	100%	100%
5	Penetapan kinerja individu (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan Penetapan kinerja individu - Melaksanakan penilaian kinerja individu 	Persentase PD yang mengukur kinerja individunya secara periodik (triwulan)	50%	60%	70%
		<ul style="list-style-type: none"> - Mengukur kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya - Melaksanakan pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik - Melaksanakan monev atas pencapaian kinerja individu - Menjadikan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar pengembangan karir individu - Menjadikan capaian kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja 	Rasio kontribusi capaian kinerja terhadap penghitungan tunjangan kinerja	40%	50%	60%
6	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1)	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku - Mengimplementasikan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 	Persentase penurunan jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	2%	2%	2%

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas	Indikator	Target		
		- Melaksanakan pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi - Melaksanakan pemberian sanksi dan imbalan	Persentase PD yang menerapkan disiplin dengan baik (ada kriteria)	60%	65%	70%
7	Pelaksanaan evaluasi jabatan (1)	Menyusun informasi faktor jabatan Menetapkan peta jabatan Menetapkan kelas jabatan	Jumlah dokumen evaluasi jabatan	1 dok	1 dok	1 dok
8	Sistem Informasi Kepegawaian (1)	- Membangun sistem informasi pegawai sesuai kebutuhan - Sistem Informasi pegawai dapat diakses oleh pegawai - Melakukan pemutakhiran sistem informasi kepegawaian - Menggunakan sistem informasi kepegawaian sebagai pendukung pengambil kebijakan manajemen SDM	Persentase data kepegawaiannya yang mutakhir pada aplikasi PNS Online	80%	100%	100%
VI Program: PENGUATAN AKUNTABILITAS			Indeks SAKIP			
1	Keterlibatan pimpinan	- Menyusun Renstra dengan melibatkan seluruh pimpinan	Persentase PD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	75%	80%	85%
		- Menyusun Penetapan Kinerja dengan melibatkan seluruh pimpinan - Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Persentase PD yang Pohon Kinerjanya Baik	75%	80%	85%
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	- Melaksanakan peningkatan kapasitas implementasi SAKIP - Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja	Persentase PD yang memiliki LKJIP baik	75%	80%	85%
		- Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik	Persentase PD yang memiliki PK Individu baik	75%	80%	85%
		- Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	Persentase PD yang mengukur PK Individu secara berkala (triwulan)	50%	55%	60%
VII Program: PENGUATAN PENGAWASAN						
1	Gratifikasi (sekretariat)	- Menyusun kebijakan penanganan gratifikasi - Melaksanakan public campaign	Persentase laporan gratifikasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		- Mengimplementasikan penanganan gratifikasi	Persentase yang telah melaporkan LHKPN	100%	100%	100%
		- Mengevaluasi kebijakan penanganan gratifikasi - Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas penanganan	Persentase PNS yang telah melaporkan LHKASN	75%	100%	100%
2	Penerapan SPIP (Irbn 1)	- Menyusun peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP - Menerapkan SPIP pada PD - Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI pada stakeholder	Maturitas SPIP	3	3.5	4
			Persentase PD yang menerapkan SPIP dengan baik	75%	77%	80%

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas	Indikator	Target		
3	Penanganan Pengaduan (Irbab 1)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan pengaduan masyarakat - Mengimplementasikan Penanganan pengaduan masyarakat - Menindaklanjuti Hasil penanganan pengaduan masyarakat - Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat - Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 	Persentase pengaduan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti (SP4N-Lapor dan Saber Pungli)	95%	96%	97%
4	Whistle-Blowing System (Irbab 4)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan Whistle Blowing System - Mengimplementasikan Whistle Blowing System - Melakukan evaluasi atas Whistle Blowing System - Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti 	Persentase pengaduan melalui WBS yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5	Penanganan Benturan Kepentingan (Irbab 4)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan Penanganan Benturan Kepentingan - Melakukan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan - Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan - Mengevaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan - Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan - Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan 	Persentase PD yang menerapkan penanganan benturan kepentingan dengan baik	75%	77%	80%
6	Pembangunan Zona Integritas (Irbab 4)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencahangan zona integritas - Menetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas - Melakukan pembangunan zona integritas - Melakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan - Pencapaian unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM" 	Persentase unit calon ZI/WBK yang lolos dievaluasi oleh Pusat (MenPANRB)	80%	80%	85%
			Jumlah unit yang berpredikat ZI/WBK	1 unit	1 unit	1 unit
7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP - Membangun SDM APIP yang memadai secara kualitas dan kuantitas. - Memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk APIP 	Maturitas APIP	level 3	level 3	level 3

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas	Indikator	Target		
VIII	Program: PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		Indeks SKM			
1	Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan mereview kebijakan standar pelayanan - Menyusun maklumat pelayanan - Menyusun SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan - Melaksanakan reuiu dan perbaikan atas standar pelayanan - Melaksanakan reuiu dan perbaikan atas SOP 	Persentase PD yang kebijakan standar pelayanan telah ditetapkan sesuai peraturan	80%	82%	85%
2	Budaya Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) - Menyebarkan Informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media - Membuat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan - pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar - Menyusun SOP pengaduan pelayanan - Melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan 	Persentase PD yang pegawainya paham tentang budaya pelayanan prima Persentase PD sudan menyebarkan informasi tentang pelayanan yang bisa diakses secara luas Persentase PD yang memiliki inovasi pelayanan	80%	85%	85%
3	Kepuasan Pelayanan	Memfasilitasi survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Persentase PD yang telah melaksanakan SKM	75%	72%	75%
			Persentase PD yang telah menindaklanjuti rekomendasi SKM	50%	55%	60%
IX	Program: QUICK WIN					
1	Pelaksanaan Quick Win	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penetapan quick win - Menerapkan program quick win - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan quick win 	Persentase quick win yang berjalan dengan baik	75%	77%	80%
			Jumlah quick win	3	4	5

TABEL R

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas			Penanggung-jawab
			2022	2023	
1	2	3	8	9	10
I	Program: Manajemen Perubahan Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik		86	87	Biro Organisasi
1	Tim Reformasi Birokrasi	- Membentuk Tim RB - Tim RB melaksanakan tugas sesuai dengan rencana aksi - Tim RB melaksanakan monev dan ditindaklanjuti	82%	85%	Biro Organisasi
2	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	- Merencanakan dan mengorganisasikan PMPRB dengan baik - Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja - melakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB - Melaksanakan PMPRB sesuai dengan ketentuan yang	35	36	Inspektorat, Biro Organisasi
			18	19	Inspektorat, Biro Organisasi
3	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	- Memastikan keterlibatan pimpinan secara aktif dan berkelanjutan dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja serta RB - Membuat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan - Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model	80%	85%	Biro Organisasi
			65%	70%	Biro Organisasi
			1 web facebook	1 web facebook	Biro Organisasi
II	Program: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Harmonisasi peraturan perundang-undangan	- Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron - merevisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	100%	100%	Biro Hukum
2	Penerapan Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	- Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem	85%	90%	Biro Hukum

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas			Penanggung-jawab
III	Program: PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI				
1	Evaluasi Kelembagaan	- Melaksanakan evaluasi kelembagaan - Menganalisa tingkat kematangan OPD	78	80	Biro Organisasi
			41	42	
2	Penataan Kelembagaan	Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mengajukan perubahan organisasi	100%	100%	
IV	PROGRAM: PENATAAN TATALAKSANA				
1	Penerapan Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	- Menyusun peta proses bisnis sesuai ketentuan - Menyusun SOP yang merupakan penjabaran peta proses bisnis - Menerapkan SOP - Mengevaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP			Biro Organisasi
			80%	85%	
			85%	90%	
2	Penerapan E-Government	- Menyusun rencana induk pengembangan e-government Provinsi Bali - Menerapkan e-gov pada lingkungan internal - Menerapkan e-gov untuk pelayanan publik	2.2	2.4	Diskominfo
			85%	90%	Diskominfo
			75%	80%	
3	Keterbukaan Informasi Publik	- Menerapkan kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik - Melakukan monev KIP	90	95	Diskominfo
			85%	90%	
			100%	100%	
			100%	100%	
4	Kualitas Pengelolaan Arsip	- Melakukan pengawasan kearsipan - Melaksanakan audit internal terhadap PD	83	85	Badan Arsip dan Perpustakaan
			57%	60%	
5	Kualitas Pengadaan Barang Jasa	- Melaksanakan pengadaan secara elektronik - Meningkatkan kualitas organisasi	95%	100%	Biro Pengadaan Barang Jasa
			level 4	level 4	
V	Program: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah, yang didukung oleh aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.		level 4	level 4	BKD

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas			Penanggung-jawab
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (1)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Analisis jabatan dan analisis beban kerja - Melaksanakan perhitungan kebutuhan pegawai - Menyusun rencana redistribusi pegawai - Menyusun proyeksi kebutuhan 5 tahun - Menghitung formasi jabatan 	82%	85%	Biro Organisasi
2	Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumumkan secara luas penerimaan pegawai - Menyelenggarakan pendaftaran dengan mudah, cepat dan pasti (online) - Menyusun persyaratan penerimaan calon pegawai yang jelas dan tidak diskriminatif - Melaksanakan seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN - Mengumumkan secara terbuka hasil seleksi 	100%	100%	BKD
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun standar kompetensi jabatan - Melakukan asesment pegawai - Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi - Menyusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi - Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan 	20%	15%	Biro Organisasi, BKD, BPSDM
4	Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan promosi terbuka - Pelaksanaan promosi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi - Melaksanakan promosi terbuka secara kompetitif dan terbuka - Melaksanakan promosi terbuka yang dilakukan oleh panitia seleksi yang independen - Mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka 	100%	100%	BKD
5	Penetapan kinerja individu (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan Penetapan kinerja individu - Melaksanakan penilaian kinerja individu 	80%	90%	BKD
		<ul style="list-style-type: none"> - Mengukur kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya - Melaksanakan pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik - Melaksanakan monev atas pencapaian kinerja individu - Menjadikan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar pengembangan karir individu - Menjadikan capaian kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja 	60%	60%	
6	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1)	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku - Mengimplementasikan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 	2%	2%	BKD

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas			Penanggung-jawab
		- Melaksanakan pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi - Melaksanakan pemberian sanksi dan imbalan	75%	80%	
7	Pelaksanaan evaluasi jabatan (1)	Menyusun informasi faktor jabatan Menetapkan peta jabatan Menetapkan kelas jabatan	1 dok	1 dok	Biro Organisasi
8	Sistem Informasi Kepegawaian (1)	- Membangun sistem informasi pegawai sesuai kebutuhan - Sistem Informasi pegawai dapat diakses oleh pegawai - Melakukan pemutakhiran sistem informasi kepegawaian - Menggunakan sistem informasi kepegawaian sebagai pendukung pengambil kebijakan manajemen SDM	100%	100%	BKD
VI Program: PENGUATAN AKUNTABILITAS					
1	Keterlibatan pimpinan	- Menyusun Renstra dengan melibatkan seluruh pimpinan	90%	95%	Bappeda
		- Menyusun Penetapan Kinerja dengan melibatkan seluruh pimpinan - Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	90%	95%	Bappeda, Biro Organisasi
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	- Melaksanakan peningkatan kapasitas implementasi SAKIP - Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja	90%	95%	Inspektorat
		- Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik	90%	95%	Biro Organisasi
		- Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	65%	70%	Biro Organisasi
VII Program: PENGUATAN PENGAWASAN					
1	Gratifikasi (sekretariat)	- Menyusun kebijakan penanganan gratifikasi - Melaksanakan public campaign	100%	100%	Inspektorat
		- Mengimplementasikan penanganan gratifikasi	100%	100%	
		- Mengevaluasi kebijakan penanganan gratifikasi - Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas penanganan	100%	100%	
2	Penerapan SPIP (Irbn 1)	- Menyusun peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP - Menerapkan SPIP pada PD	4.5	5	Inspektorat
		- Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI pada stakeholder	83%	85%	

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas			Penanggung-jawab
3	Penanganan Pengaduan (Irbab 1)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan pengaduan masyarakat - Mengimplementasikan Penanganan pengaduan masyarakat - Menindaklanjuti Hasil penanganan pengaduan masyarakat - Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat - Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 	98%	100%	Inspektorat
4	Whistle-Blowing System (Irbab 4)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan Whistle Blowing System - Mengimplementasikan Whistle Blowing System - Melakukan evaluasi atas Whistle Blowing System - Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti 	100%	100%	Inspektorat
5	Penanganan Benturan Kepentingan (Irbab 4)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan Penanganan Benturan Kepentingan - Melakukan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan - Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan - Mengevaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan - Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan - Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan 	83%	85%	Inspektorat
6	Pembangunan Zona Integritas (Irbab 4)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencahangan zona integritas - Menetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas - Melakukan pembangunan zona integritas - Melakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan - Pencapaian unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM” 	85%	90%	Inspektorat, Biro Organisasi
			1 unit	1 unit	Biro Organisasi
7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP - Membangun SDM APIP yang memadai secara kualitas dan kuantitas. - Memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk APIP 	level 4	level 4	Inspektorat

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas			Penanggung-jawab
VIII	Program: PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan mereview kebijakan standar pelayanan - Menyusun maklumat pelayanan - Menyusun SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan - Melaksanakan reuiu dan perbaikan atas standar pelayanan - Melaksanakan reuiu dan perbaikan atas SOP 	87%	90%	Biro Organisasi
2	Budaya Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) - Menyebarkan Informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media - Membuat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan - pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar - Menyusun SOP pengaduan pelayanan - Melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan 	90%	90%	Biro Organisasi
			90%	90%	Biro Organisasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Membuat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan - pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar - Menyusun SOP pengaduan pelayanan - Melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan 	75%	80%	Biro Organisasi
3	Kepuasan Pelayanan	Memfasilitasi survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	77%	80%	Biro Organisasi
			65%	70%	
IX	Program: QUICK WIN				
1	Pelaksanaan Quick Win	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penetapan quick win - Menerapkan program quick win - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan quick win 	82%	85%	Biro Organisasi
			6	7	